



**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KELAS I JAKARTA

2019

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi

dan Informatika Tahun 2019, merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Laporan ini merupakan suatu alat dalam menilai dan mengevaluasi capaian kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

LAKIN ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat.

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Jakarta



M. Azmi Ridho

Ringkasan Eksekutif



Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, khususnya penggunaan frekuensi radio di Indonesia.

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Sebagai pengawas dan pengendali penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, mempunyai tugas antara lain melakukan monitoring dan mengukur parameter teknis, mendeteksi sumber pancaran frekuensi radio, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan

frekuensi radio. Hal ini sebagai pembinaan pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib, efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.

Penilaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat dilihat dari pencapaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

No	Kinerja	Indikator Kinerja		Target 2019	Capaian 2019	Persentase
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	82.3%	102.87%
		2	Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	1	Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%
		2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥ 94 (dari skala 100)	96.68%	102.85%

Pada Sasaran Kinerja 1 **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 2 indikator

kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI menargetkan 80% kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Capaian ini diperoleh dari 8 indikator, antara lain, persentase observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di kabupaten/kota, jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, persentase stasiun radio penyiaran (radio FM dan TV) yang terukur, persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal, persentase berfungsinya perangkat pendukung

SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT, pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi serta persentase pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR. Untuk tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Jakarta telah melaksanakan 26 kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika, 6 kegiatan Penertiban Frekuensi Radio dan Tindak Lanjut Hasil Penertiban, 26 kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio dan 12 kegiatan Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 82.30% dari target sebesar 80%.

Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk capaian kinerja pemenuhan pelayanan publik SFR dan perangkat serta penanganan BHP frekuensi radio. Capaian kinerja ini diperoleh dari 5 indikator, antara lain, persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan, persentase pelaksanaan sosialisasi dan

bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan UPT, jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan, jumlah laporan penanganan waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang serta persentase terlaksananya UNAR. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Pada Sasaran Kinerja 2 **“Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspektredrad yang**

Bersih, Efisien dan Efektif” terdapat 2 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja.

Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Pada tahun 2019, persentase layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan terlaksana 100%. Capaian ini diperoleh 4 indikator, yaitu jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran, pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen

penatausahaan kepegawaian UPT dan jumlah dokumen keuangan UPT. Pada sisi pengelolaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar 94,86%, yaitu Rp. 13.566.425.078,- dari total pagu sebesar Rp. 14.301.677.000,-.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Penyempurnaan kualitas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dengan diimplementasikannya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mulai dilakukan pada tahun 2019. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mencapai IKPA Score sebesar 96,68 pada akhir tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Balai Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Kelas I Jakarta mencapai IKPA Score melebihi target yang ditentukan yaitu 94. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan meliputi realisasi anggaran, tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus dan dispensasi SPM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	12
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	13
BAB II PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019	15
B. SASARAN PROGRAM.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.	
1. Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	18
2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	33

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONSPEKFREDRAD
YANG BERSIH, EFISIEN, DAN EFEKTIF.

1. Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan.....	43
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	51
B. KINERJA LAINNYA.....	53
C. REALISASI ANGGARAN	56
BAB IV PENUTUP.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi radio secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan upaya meningkatkan kinerja di waktu mendatang

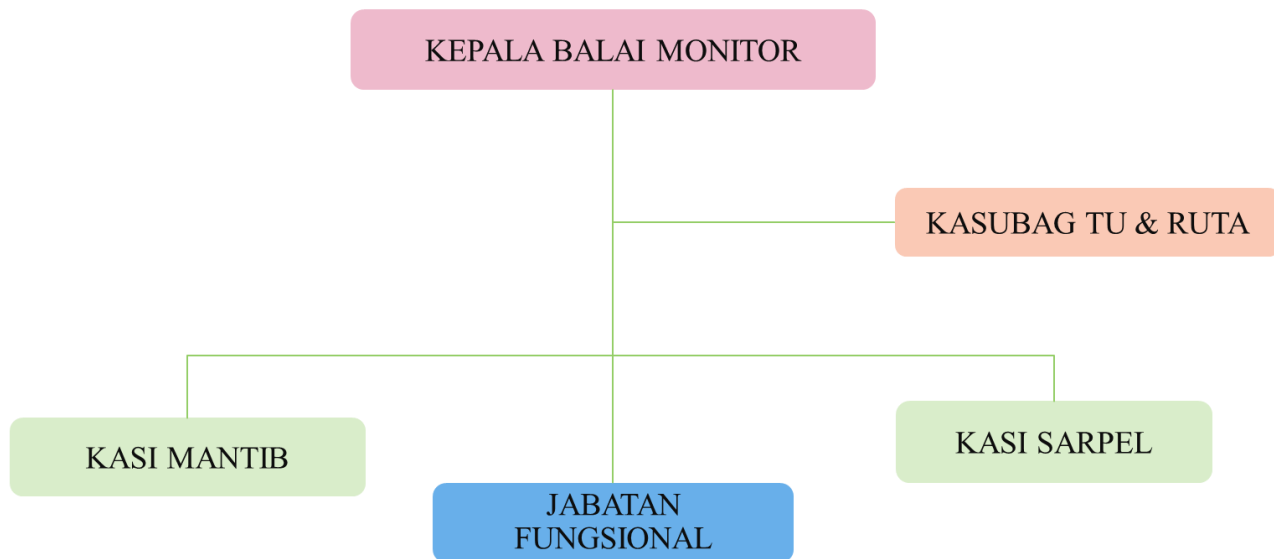
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur Organisasi:

STRUKTUR ORGANISASI BALMON KELAS I JAKARTA



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan bebas dari segala interferensi yang merugikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta perlu mengimplementasikan sistem pengendalian dan pengawasan yang profesional sesuai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio, antara lain:

1. Masih banyaknya pengguna frekuensi ilegal yang membahayakan keselamatan maritim dan penerbangan;
2. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR);
3. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan *jammer* seluler;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa penggunaan frekuensi harus disertai dengan Izin Stasiun Radio (ISR);
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana monitoring yang sesuai dengan perkembangan teknologi;
6. Banyaknya piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang belum tertagih diakibatkan dari perpindahan alamat yang tidak melaporkan;

D. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi:

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2019.

3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandate perundangan serta kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. Sasaran Program

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015-2019.

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor memiliki ISR atau tidak;
2. Mengetahui kesesuaian penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dengan ISR yang bersangkutan dan peraturan standar parameter teknis yang berlaku;
3. Penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal;

4. Melakukan penertiban pengguna frekuensi radio ilegal di wilayah DKI Jakarta berdasarkan hasil inspeksi, penanganan gangguan dan pengukuran di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor;
5. Kesesuaian data frekuensi ISR dan frekuensi aktual pada *site / on the spot* penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berdasarkan hasil observasi monitoring di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten, Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor;
6. Pemeliharaan Stasiun ADF di:
 - a. Master Ciracas;
 - b. Slave GSP;
 - c. Slave Bambu Larangan;
 - d. Slave Rorotan;
 - e. Slave Maninjau.
7. Pencetakan dan pendistribusian SPP BHP frekuensi radio kepada Wajib Bayar;
8. Pelaksanaan UNAR sesuai volume pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPT Jakarta;
9. Layanan penerimaan pengaduan gangguan frekuensi radio dari pengguna legal;

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kinerja		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	82.3%	102.87%
	2	Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1	Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
	2	ilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥ 94 (dari skala 100)	96.68	102.85%

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 14.301.677.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Indikator kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT terlaksana sebesar 82.3% dari target sebesar 80% dengan persentase sebesar 102.87%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	82.3%	102.87%

Perbandingan Perbandingan capaian indikator kinerja **Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT** selama 5 (tahun) tahun terakhir dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	80%	80%	100%	80%	100%

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	100%	80%	121.17%

Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota.	80 %	100 %	125%

Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor *portabel* melalui pengamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam per *subservice*/ pita dengan merekam kanal, level serta waktu pendudukannya.

Direktorat Pengendalian SDPPI melalui nota dinas nomor: 068/DJSDPPI.4/SP.03.03/01/2019 tanggal 30 Januari 2019, menyampaikan 22 *subservice*/pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2019 oleh setiap UPT Ditjen SDPPI melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatan okupansi) dan pengukuran parameter teknis. Adapun 22 *subservice*/pita frekuensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Subservice	Pita Frekuensi	Kegiatan
1	Maritim, Marabahaya	479 – 526.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
2	Radio AM	535 – 1606.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
3	Marabahaya	2173.5 – 2190.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
4	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 – 6765 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
5	Penerbangan HF (11 MHz)	11175 – 11400 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
6	Radio FM	87.5 – 108 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi, Pengukuran Parameter Teknis
7	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
8	Konsesi, Maritim VHF	150 – 174 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
9	Televisi VHF, DAB	174 – 230 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
10	Konsesi, Hankam, Seluler 450	230 – 430 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430 – 470 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
12	Televisi UHF	478 – 806 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi, Pengukuran Parameter Teknis
13	Trunking, Selular 800	806 – 880 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
14	Selular 900	880 – 960 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
15	Potensi Broadband 1400	1400 – 1520 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi

16	Selular 1800	1710 – 1880 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
17	Potensi Broadband 1900	1880 – 1920 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
18	Selular 2100	1920 – 2170 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
19	BWA 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
20	Broadband, Siaran Satelit	2500 – 2690 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
21	BWA 3.3 GHz	3300 – 3400 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
22	Potensi Broadband 5 GHz	5140 – 5925 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi

Subservice/pita target monitoring UPT Ditjen SDPPI untuk tahun 2019



Peta Wilayah Kerja Balai Monitor Kelas I Jakarta

Wilayah kerja Balai Monitor kelas I Jakarta terdiri dari 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Pada tahun 2019, Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota adalah sebesar 80% atau setara dengan 9 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Monitor Kelas I Jakarta. Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu memonitor seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya pada tahun 2019 ini, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan.

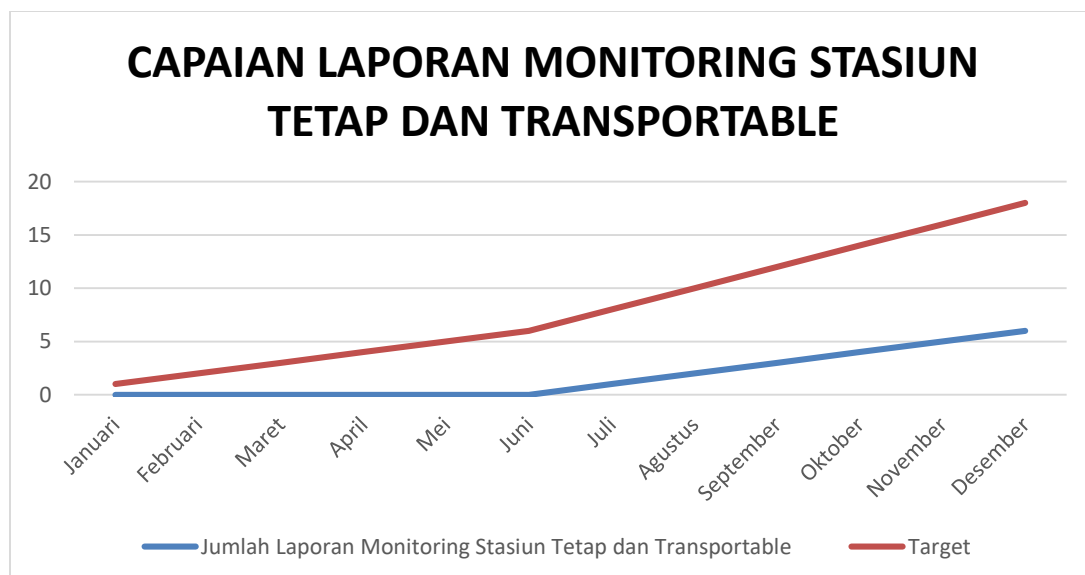
Gambar Kegiatan Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota



Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	6 Laporan	50%

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable dengan target 12 Laporan belum tercapai oleh Balai Monitor Kelas I Jakarta. Hal ini dikarenakan kegiatan monitoring stasiun SMFR tetap dan transportable baru dimulai pada bulan Juli, sehingga pada akhir tahun yaitu bulan Desember realisasi baru mencapai 6 Laporan atau 50% dari target yang telah ditentukan.



Gambar Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio Stasiun SMFR Tetap dan Transportable



Persentase Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Presentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35 %	79 %	225.71%

Pada layanan Siaran, khususnya subservis Radio FM, AM dan TV di wilayah kerja Balai Monitor Kelas I Jakarta memiliki total 90 penyelenggaraan Radio Siaran FM, AM dan TV yang ber-ISR. Penyelenggara ber-ISR tersebut terdiri atas 43 ISR penyelenggara Radio FM DKI Jakarta, 4 ISR penyelenggara Radio AM DKI Jakarta, 20 ISR penyelenggara TV DKI Jakarta, 8 ISR penyelenggara Radio FM Kabupaten Bogor, 4 ISR penyelenggara Radio FM Kota Bogor, 1 ISR penyelenggara Radio AM Kabupaten Bogor, 1 ISR penyelenggara TV Kabupaten Bogor, 4 ISR penyelenggara Radio FM Kota Depok, 1 ISR penyelenggara Radio AM Kota Depok, 1 ISR penyelenggara TV Kota Depok, 1 ISR penyelenggara

Radio FM Kota Bekasi, 1 ISR penyelenggara Radio FM Kabupaten Bekasi, 1 ISR penyelenggara Radio AM Kabupaten Bekasi, 1 ISR penyelenggara TV Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data tersebut, maka target Radio FM, AM dan TV yang harus terukur pada tahun 2019 adalah sebanyak 32 stasiun Radio FM, AM dan TV.

Stasiun Radio FM, AM dan TV terukur hingga bulan Desember sebanyak 71 stasiun. Oleh karenanya Capaian Balai Monitor Kelas I Jakarta untuk Indikator Presentase stasiun radio penyiaran (Radio FM, AM dan TV) yang terukur sebesar 225.71% dari target yang telah ditetapkan.

Pengukuran Karakteristik Radio Siaran dan TV Siaran ini bertujuan agar para lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siarannya sesuai dengan aturan, yaitu Permen Kominfo No. 3 Tahun 2017 untuk Radio Siaran FM dan Permen Kominfo No. 31 Tahun 2014 untuk TV Siaran UHF. Apabila hasil ukur menunjukkan adanya pelanggaran, maka Balai Monitor Kelas I Jakarta segera memberi peringatan untuk menyesuaikan parameter teknisnya sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan frekuensi radio utamanya frekuensi penerbangan.

Gambar Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio Penyiaran





Persentase Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal	50 %	53 %	106%

Tindak Lanjut penggunaan Frekuensi Ilegal merupakan tindak lanjut hasil kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standarisasi Perangkat Telekomunikasi yang ditemukenali tidak memiliki ISR agar segera memiliki ISR atau menonaktifkan stasiun pemancarnya.

Hasil dari tindak lanjut tersebut membutuhkan proses yang diawali dengan Surat Peringatan dari Balai Monitor Kelas I Jakarta kepada pengguna yang belum memiliki ISR hingga terbitnya ISR oleh pengguna frekuensi radio atau Surat Pernyataan dari pengguna frekuensi radio bahwa mereka telah *Off Air* dilanjutkan dengan pengukuran stasiun radio pemancar. Tindak lanjut lainnya juga berupa penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Oleh karena hal tersebut maka realisasi hasil monitoring illegal yang ditindaklanjuti masih 0% selama 3 (tiga) bulan pertama tahun 2019. Hasil akhir pada bulan Desember tahun 2019

diperoleh 90 dari 170 ilegal sudah ditindak lanjuti sehingga realisasi mencapai 53% atau dengan kata lain Capaian Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti mencapai 106% dari target 50% yang telah ditetapkan.

Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	85 %	100 %	117.64%

Indikator kinerja Persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT. Target 85%, realisasi kegiatan 100% dan capaian 117,64%. Anggaran kegiatan Inspeksi Kondisi Stasiun Monitor Tetap Rp. 113.800.000.-

Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur adalah mutlak yang harus diperhatikan. Jumlah Data perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta ada 30 perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur terdiri dari 26 unit perangkat pendukung SMFR yang mandiri dan 4 unit perangkat pendukung SMFR yang terintegrasi dengan Stasiun Slave dan 1 (satu) stasiun repeater, dimana 4 Stasiun Slave tersebut terdiri dari :

- Stasiun Slave Maninjau, terdiri dari perangkat SMFR berbasis link dengan merk perangkat TCI menggunakan aplikasi scorpio dengan system dan DF serta perangkat Repeater.
- Stasiun Slave Bambu Larangan , terdiri dari perangkat SMFR berbasis link dengan merk perangkat TCI menggunakan aplikasi scorpio dengan system dan DF serta perangkat Repeater.

- c. Stasiun Slave Rorotan, terdiri dari perangkat SMFR berbasis link dengan merk perangkat TCI menggunakan aplikasi scorpio dengan system dan DF serta perangkat Repeater.
- d. Stasiun GSP Lt. 24, terdiri dari perangkat SMFR berbasis link dengan merk perangkat TCI menggunakan aplikasi scorpio dengan system dan DF serta perangkat Repeater.

Target persentase Perjanjian Kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur adalah 85% dengan hasil capaian persentase yang telah dilaksanakan adalah sebesar 89,29%. Indikator pencapaian adalah berfungsinya perangkat SMFR dan alat pendukung dengan baik dan berfungsi secara optimal serta dapat digunakan oleh PPFR dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan yang ada adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana monitoring yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.

Tabel Penggunaan Perangkat

No	Nama Perangkat	Jumlah	Status		Persentase	Keterangan
			Berfungsi	Tidak berfungsi	%	
1	Spectrum Analyzer	7	7	0	100	.
2	Receiver (PR 100)	3	3	0	100	.
3	TV Digital Analyzer	1	1	0	100	.
4	Mobil Mon DF	2	1	1	50	.
5	Stasiun Slave	4	3	1	75	Stasiun Maninjau Rusak
6	Frequency Counter	3	3	0	100	.
7	GPS	4	4	0	100	.
TOTAL		24	22	2	89,29	

Gambar Kegiatan Inspeksi Stasiun Slave



Pelaksanaan Monitoring Dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Jumlah Laporan Monitoring Dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	1 Laporan	2 Laporan	200%

Selain mengawasi penggunaan frekuensi di wilayah kerja Balai Monitor Kelas I Jakarta juga melaksanakan pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi. Pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi ini sebagai upaya meminimalisir penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak terstandarisasi, dimana perangkat yang belum terstandarisasi beresiko memiliki parameter teknis yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menimbulkan gangguan frekuensi bagi pengguna frekuensi lainnya.

Target pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi sebanyak 1 Laporan dalam tahun 2019 dapat dicapai pada bulan September Tahun 2019. Hingga akhir tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi ini menghasilkan 2 Laporan pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi sehingga capaian Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti mencapai 200% dari target yang telah ditetapkan.

Gambar Kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi



Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85 %	94 %	110.58%

Kegiatan Inspeksi stasiun Radio merupakan tindak lanjut dari kegiatan Validasi data ISR yang bertujuan meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data ISR untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan data yang dapat memberi nilai tambah untuk kepentingan publik. Target dari kegiatan ini adalah 85% ISR hasil inspeksi valid dari data sampling.

Data yang tidak sesuai ISR ditindaklanjuti agar sesuai ISR dengan cara:

- ISR Baru
- Perubahan data ISR
- Penghentian Masa Laku ISR

Hingga akhir tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR sudah terealisasi sebesar 94% dengan rincian dari 1053 data sampling, 632 Stasiun Radio Aktif telah sesuai ISR dan 363 Stasiun Radio hasil tindak lanjut inspeksi sudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Capaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR mencapai 110.58% dari target yang sudah ditetapkan.

Gambar Kegiatan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR



2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Indikator kinerja pemenuhan pelayanan publik SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertibam serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Persentase Penyelesaian Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Persentase (%) Penyelesaian Aduan/klaim dan konsultasi yang diadakan	95 %	100 %	105,26%

Penggunaan frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang mengakibatkan permasalahan dalam penggunaan frekuensi radio sangat beragam dan cenderung semakin meningkat. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifikasi/distandarisasi oleh Ditjen SDPPI Kemkominfo. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio tersebut, seringkali menimbulkan gangguan frekuensi radio antar pengguna frekuensi radio. Untuk itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) sebagai pengawas dan pengendali terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio serta senantiasa harus siap sedia dalam hal melakukan penanganan gangguan frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya yang berada di wilayah kerjanya.

Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pancaran frekuensi radio dan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien, dan optimal, melakukan aktifitas pancaran frekuensi radio setelah memiliki ISR, menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai

dengan peruntukannya serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.

Capaian Kinerja untuk Indikator Penyelesaian Aduan/klaim dan konsultasi yang diajukan hingga akhir TA. 2019 adalah sebesar 105,26 % dari Target sebesar 95% yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 100% aduan/klaim gangguan dapat diatasi hingga Clear.

Gambar Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio



Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	100 %	100 %	100%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio tahun 2019 target 100%, realisasi dan capaian 100%. Pagu Anggaran kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Rp. 98.715.00,- dan Realisasi Anggaran yang telah dilaksanakan Rp 96.546.500,-. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aston Pluit Jakarta Utara. Tema pada kegiatan sosialisasi “Dengan Perizinan ISR Maritime On The Spot Kita Wujudkan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang Tertib dan Aman”. Dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang terdiri dari para pemilik kapal, asosiasi perikanan, perwakilan nelayan, koperasi nelayan, agen kapal. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi yaitu dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Perwakilan dari Direktorat Operasi Sumber Daya dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta. Permasalahan yang ada dalam kegiatan sosialisasi frekuensi radio kepada masyarakat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa penggunaan frekuensi harus disertai dengan Izin Stasiun Radio (ISR), banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan masih banyaknya penggunaan frekuensi ilegal yang membahayakan bagi keselamatan maritime dan penerbangan.

Gambar. Kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio Kepada Masyarakat



Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Indikator Kinerja jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang telah dilimpahkan dengan target 4 laporan, realisasi yang telah dilaksanakan 4 laporan dan capaian 100%. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio adalah salah satu Perjanjian Kinerja untuk kegiatan tugas dan fungsi (tusi) Seksi Sarana dan Pelayanan, adapun target persentase kegiatan pendampingan adalah 100% dengan persentase pencapaian

kegiatan 100% dalam tahun anggaran 2019. Untuk kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio dengan pagu anggaran sebesar Rp. 241.350.000.-, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan Rp. 234.645.250,-.

Permasalahan yang ada dalam Pendampingan KPKNL atas Waba yang telah dilimpahkan adalah banyaknya piutang BHP Frekuensi Radio yang belum tertagih diakibatkan dari perpindahan alamat yang tidak melaporkan.

1 (satu) kegiatan tidak terlaksana dari target 6 (enam) kegiatan yang telah diprogramkan yaitu kegiatan pendampingan KPKNL dalam rangka tindak lanjut penanganan pelimpahan piutang BHP Frekuensi Radio dari Ditjen SDPPI. Hal ini dikarenakan adanya penundaan kegiatan penyampaian surat paksa dari pihak KPKNL mengingat terbatasnya personil dan adanya prioritas target penyelesaian berkas tahun 2019, melalui surat dinas Kepala KPKNL Jakarta V Nomor : S-4058/WKN.07/KNL.05/2019 Tanggal 3 Desember 2019 perihal Penundaan Penyampaian Surat Paksa.

Dengan adanya penundaan 1 (satu) kegiatan pendampingan KPKNL dalam rangka tindak lanjut penanganan pelimpahan piutang BHP Frekuensi Radio dari Ditjen SDPPI tersebut maka anggaran yang tersedia digunakan untuk melaksanakan Pencegahan Piutang BHP Frekuensi Radio dalam bentuk kegiatan klarifikasi Tagihan BHP Frekuensi Radio kepada Wajib Bayar sesuai lokasi alamat terdaftar di wilayah DKI Jakarta.

Adapun rincian hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Dalam dan Luar Kota) adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Pendampingan KPKNL

WILAYAH KERJA KPKNL	JML Targ et Kegiatan	Jml Kegiatan Terlak sana	Jml Penan ggung Hutang	Jmlh Total Pembayaran Piutang (Rp)	HASIL PENDAMPINGAN PENGURUSAN PENYERAHAN PIUTANG KE KPKNL						
					Kore ksi	Penyerahan	Pelunasan	Pengembal ian	PSBDT	BELUM SP3N	Saldo Besaran Piutang
DKI JAKARTA	6	5	735	518.926.587.902	-	2.408.280.172.039	7.843.771.175	87.540.398.930	964.206.251	245.232.718	1.800.625.557.848
BOGOR	1	1	12	72.016.736	-	120.749.934	62.592.173	-	8.972.957	-	39.760.241
BEKASI	1	1	15	45.964.763	-	177.362.736	44.964.763	-	38.921.167	-	92.476.806
JUMLAH	8	7	762	519.044.569.401	-	2.408.578.284.709	7.951.328.111	87.540.398.930	1.012.100.375	245.232.718	1.800.757.794.895

Tabel. Kegiatan Klarifikasi Dan Pencegahan Piutang

Wilayah	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Jumlah Tagihan	Alamat Tdk Ditemuk an	Surat Peringatan /SPP				Realisasi Sesuai Surat Peringatan/SPP (Rp)			
					1	2	3	4	1	2	3	4
Dalam Kota (DKI Jakarta)	10	13	378.788.277	42	37	34	18	16	51.377.177	59.398.522	17.464.783	33.645.291
Luar Kota (Bogor, Bekasi, Depok)	8	10	197.822.765	2	17	11	4	0	49.357.332	14.468.768	4.231.695	30.636.155
JUMLAH	18	23	576.611.042	44	54	45	22	16	100.734.509	73.867.290	21.696.478	64.281.446

Pada kegiatan tersebut, banyak Waba (Wajib Bayar) yang kami datangi untuk memberitahu jatuh tempo pembayaran Piutang BHP Frekuensi Radio, mengetahui perusahaan tersebut masih tetap beroperasi dan masih dilokasi tersebut atau sudah pindah, juga untuk memberikan informasi dan bimbingan / pendampingan dalam pembuatan akun spectraweb.

Gambar. Kegiatan Pendampingan dan Klarifikasi KPKNL



Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang	12 Laporan	12 Laporan	100%

Indikator Kinerja jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan Waba berpiutang dengan target 12 laporan, realisasi yang telah dilaksanakan 12 laporan serta capaian 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari

distribusi SPP jumlah 1322 dokumen, ST dengan jumlah 551 dokumen, dan distribusi ISR dengan jumlah 227 dokumen.

Tabel Distribusi SPP, ST dan ISR

	Bulan	SPP			ST			ISR		
		TERBIT	DISTRIBUSI	%	TERBIT	DISTRIBUSI	%	TERBIT	DISTRIBUSI	%
1	Januari	288	288	100	120	120	100	5	5	100
2	FEBRUARI	497	497	100	128	128	100	4	4	100
3	Maret	218	218	100	34	34	100	7	7	100
4	APRIL	5	5	100	5	5	100	5	5	100
5	MEI	8	8	100	5	5	100	8	8	100
6	JUNI	2	2	100	7	7	100	2	2	100
7	JULI	95	95	100	50	50	100	2	2	100
8	AGUSTUS	77	77	100	44	44	100	77	77	100
9	SEPTEMBER	70	70	100	78	78	100	70	70	100
10	OKTOBER	37	37	100	35	35	100	28	28	100
11	NOVEMBER	12	12	100	38	38	100	12	12	100
12	DESEMBER	13	13	100	7	7	100	7	7	100
JUMLAH		1322	1322		551	551		227	227	

Berdasarkan Tabel diatas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melakukan percetakan dan pendistribusian SPP sebanyak 1322 dokumen, percetakan dan pendistribusian Surat Teguran Keterlambatan Bayar (Reminder) ke-1 sampai dengan 4 sebanyak 551 dokumen dan pendistribusian izin Stasiun Radio (ISR) sebanyak 227 dokumen, dengan demikian pencetakan dan pendistribusian SPP, ST Reminder dan ISR yang merupakan bagian Perjanjian Kinerja yang harus direalisasikan oleh tiap UPT telah terlaksana 100% sesuai target PK yang ditentukan.

Permasalahan yang ada dalam penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurusan Waba berpiutang adalah banyaknya piutang BHP Frekuensi Radio yang belum tertagih diakibatkan dari perpindahan alamat yang tidak melaporkan, dan banyak perusahaan yang belum memiliki akun spectraweb.

Persentase Terlaksananya Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Persentase (%) Terlaksananya Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) target 100%, realisasi kegiatan 100% dan capaian 100%. Pagu kegiatan UNAR sebesar Rp. 24.990.000.- dan realisasi anggaran kegiatan Rp. 23.247.000,-. Pada kegiatan UNAR pendaftaran peserta dilaksanakan dengan memakai sistem daring (Online System) sebagai upaya dalam meningkatkan / percepatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para penggiat Radio Amatir dengan tetap masih berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Penyelenggaraan Amatir Radio. Kegiatan UNAR di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019 dengan jumlah peserta 323 orang, yang terdiri dari:

- Tingkat Siaga 314 Orang
- Tingkat Penggalang 8 Orang
- Tingkat Penegak 1 Orang

Untuk ujian Tingkat Penggalang dan Penegak menggunakan sistem C.A.T (Computer Assisten Test), sedangkan Tingkat Siaga dengan ujian manual. Berdasarkan hasil Evaluasi Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), telah ditetapkan hasil kelulusan UNAR oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selaku ketua Panitia UNAR dengan Surat Keputusan Nomor: 45 Tahun 2019 tentang penetapan kelulusan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di DKI Jakarta tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

- Tingkat Siaga 261 Orang
- Tingkat Penggalang 8 Orang
- Tingkat Penegak 1 Orang

Persentase hasil kelulusan UNAR tahun 2019 mencapai 83,60% total jumlah 323 peserta.

Gambar. Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio



Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang Bersih, Efisien, dan Efektif

1. Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Indikator kinerja layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ditargetkan sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%

Perbandingan capaian indikator kinerja **Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan** selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, penerapan indikator kinerja persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan belum diterapkan. Pada tahun 2015, penetapan kinerja hanya terfokus pada persentase (%) kabupaten/kota termonitor dan persentase (%) penanganan aduan/klaim gangguan penggunaa spektrum frekuensi radio. Pada tahun 2016 adalah capaian kinerja layanan dukungan teknis dengan target 100%, sementara tahun

2017 capaian kinerja hanya mencakup persentase (%) kabupaten/kota termonitor, persentase (%) dinas siaran yang terukur dan persentase (%) aduan yang ditangani. Penerapan capaian kinerja dengan indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan baru diterapkan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019, indikator ini diukur menggunakan formula yang berbeda dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, indikator ini diukur melalui beberapa kriteria penilaian, antara lain jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT dan jumlah dokumen keuangan UPT.

Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja Sesuai Aturan yang Berlaku

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pelaksanaan atau penyerapan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan yang telah direncanakan, antara lain:

1. Pelaporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan melalui aplikasi SMART DJA, e-monev Bappenas, matriks rocan dan pengisian capaian Perjanjian Kinerja melalui aplikasi SIPINTER.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2019 berupa LPJ Bendahara dan pelaporan konfirmasi afirmasi pajak yang disetor melalui KPPN paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Sesuai Aturan yang Berlaku

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Neraca menggambarkan informasi mengenai posisi laporan keuangan suatu entitas yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tahun berjalan. Neraca Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta posisi 31 Desember 2019 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Barang Konsumsi	109.794.995
Tanah	21.531.657.000
Peralatan Mesin	41.232.246.122
Gedung dan Bangunan	11.053.214.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(29.740.158.057)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(849.326.419)
Software	830.645.701
Akumulasi Amortisasi Software	(830.645.701)
Jumlah	43.337.427.641

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta melaksanakan penghapusan BMN sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan
1	3030304009	Modulation/Jumping Meter	1	ROHDE dan SCHWARZ 334201554	1983
2	3030304009	Modulation/Jumping Meter	2	ROHDE dan SCHWARZ 334201554	1983
3	3030304009	Modulation/Jumping Meter	3	MCQF4134	1983
4	3030304009	Modulation/Jumping Meter	4	MCQF4134	1983
5	3030304009	Modulation/Jumping Meter	5	MCQF4134	1983
6	3050104002	Lemari Kayu	38	Lemari File	2012
7	3050104005	Filing Cabinet Besi	20	Barata	2003
8	3050104005	Filing Cabinet Besi	21	Ragam	2003
9	3050104007	Brandkas	5	Ichiban	2003
10	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	SECURRE	2007
11	3050105028	Overhead Projector	7	Infocus	2012
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	187	-	2012
13	3050201003	Kursi Besi/Metal	191	-	2012
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	193	-	2012
15	3050201003	Kursi Besi/Metal	198	-	2012
16	3050201003	Kursi Besi/Metal	199	-	2012
17	3050202003	Jam Elektronik	33	/5/2007 SEIKO	2007
18	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Juve	2000
19	3050204004	A.C. Split	44	/5/2007 PANASONIC	2007
20	3050204004	A.C. Split	49	PANASONIC	2012
21	3050204004	A.C. Split	61	PANASONIC	2012
22	3050206059	Kabel Roll	8	ROTATOR KABEL	2006
23	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	31	APC SMART SUA5000RMI5U	2012
24	3060102145	Connectors	1	Connector Set	2011
25	3060102145	Connectors	2	CONNECTOR SET I	2012
26	3060102145	Connectors	3	CONNECTOR SET II	2012
27	3060201010	Facsimile	7	Panasonic KXFLB802	2011
28	3060323021	All Band Receiver	29	Comm Receiver COMICR8500	2004
29	3080111137	Tripod	3	ANRITSU/MB9A	1983
30	3080111137	Tripod	7	HP/11968C	1983
31	3080141320	Watt Meter	1	BIRD ELECTRONIC4305A	1983
32	3080141320	Watt Meter	2	BIRD ELECTRONIC4305A	1983
33	3080141320	Watt Meter	3	BIRD ELECTRONIC4412	1983
34	3100102002	Lap Top	11	ASUS A450LC - i5	2014
35	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	CANON IP.100	2009
36	3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	1	Huawei E5220	2015

Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki 37 pegawai negeri sipil dan 36 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang terdiri dari 3 orang pramubakti, 5 orang pengemudi, 12 orang petugas kebersihan, 2 orang teknisi dan 14 orang tenaga kemanan.

Perbandingan jumlah pegawai pada 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	2015	2016	2017	2018	2019
Pegawai Negeri Sipil	41	39	41	37	37
PPNPN	32	32	32	39	36



Foto Kegiatan Upacara 17 Agustus Dilingkungan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta

Terlampir Data Kenaikan Pangkat Pegawai pada tahun 2019:

NO	NAMA/ NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	MUCHAMMAD MA'RUF, S.Sos, M.M. 196606011988021001	KP GOL (III/d) ke (IV/a)	01-Apr-19	26 Tahun 02 Bulan
2	HERMAN SOLEH, S.H, M.M 197301311992031000	KP GOL (III/d) ke (IV/a)	01-Apr-19	23 Tahun 01 Bulan
3	MAHADI PARDEDE, S.H. M.H. 1983 0914 2006 04 1002	KP GOL (III/b) ke (III/c)	01-Apr-19	08 Tahun 0 Bulan
4	KARINA DWITYANING ASTUTI, ST 198612292011012012	KP GOL (III/b) ke (III/c)	01-Apr-19	08 Tahun 03 Bulan
5	HENDY NUR HIDAYAT 197611292007011003	KP GOL (II/c) ke (II/d)	01-Apr-19	16 Tahun 03 Bulan
6	RAKHMAN HASYM, S.T 197507132000031002	KP GOL (III/c) ke (III/d)	1 Oktober 2019	17 Tahun 07 Bulan
7	I.G.A KARTIKA AYU 197504301999032002	KP GOL (III/a) ke (III/b)	1 Oktober 2019	15 Tahun 07 Bulan

Data Kenaikan Gaji Berkala tahun 2019:

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT	TMT	MASA KERJA
1	Ir. M. AZMI RIDHO, M.M. 1962 1231 1991 03 1041	Pembina Muda Tk.I IV/b	1 Maret 2019	28 TAHUN 0 BULAN
2	TRI BUDI SANTOSA, S.Kom. 1964 0416 1986 03 1003	Pembina Muda IV/a	1 Maret 2019	28 TAHUN 0 BULAN
3	EKA PRIYADI 1966 0107 1986 03 1003	Penata Tk.I III/d	1 Maret 2019	28 TAHUN 0 BULAN
4	HERI MARTONO, S.H. M.M. 1973 0304 2000 03 1002	Penata III/c	1 Maret 2019	14 TAHUN 0 BULAN
5	PANUT PAMUJI 1963 0525 1985 03 1005	Penata Muda Tk.I III/b	1 Maret 2019	26 TAHUN 0 BULAN
6	IMAM SUBANDI 1971 0312 1992 03 1001	Pengatur II/c	1 Maret 2018	23 TAHUN 0 BULAN
7	WACHYU 1963 0202 1985 03 1003	Penata III/c	1 Maret 2018	28 TAHUN 0 BULAN
8	MULYANA 1963 0608 1987 03 1008	Penata III/c	1 Maret 2018	26 TAHUN 0 BULAN
9	RAKHMAN HASYIM., S.T. 197507132000031002	Penata III/c	1 Maret 2018	16 TAHUN 0 BULAN

10	HENDY NURHIDAYAT 1976 1129 2007 011003	Pengatur II/c	1 Maret 2018	15 TAHUN 0 BULAN
11	RISVONSUS SIALLAGAN 1967 0302 1988 02 1001	Penata Muda Tk.I III/b	1 Februari 2019	26 TAHUN 0 BULAN
12	BAMBANG SUGIHARTO 1965 0617 1986 03 1006	Penata Muda Tk.I III/b	1 Maret 2019	28 TAHUN 0 BULAN
13	ISWAHYUDI 1963 0501 1986 03 1004	Penata Muda Tk.I III/b	1 Maret 2019	28 TAHUN 0 BULAN
14	SUGIANTO 196308151986031000	Penata Muda Tk.I III/b	1 Maret 2019	22 TAHUN 0 BULAN
15	PUJILAH 1966 0416 1992 03 2002	Penata Muda Tk.I III/b	1 Maret 2019	20 TAHUN 0 BULAN
16	MAHADI PARDEDE, S.H. M.H. 1983 0914 2006 04 1002	Penata Muda Tk.I III/b	01-Apr-19	08 TAHUN 0 BULAN
17	WIDIYATMO, S.H. 1976 0910 2006 04 1004	Penata Muda Tk.I III/b	01-Apr-19	08 TAHUN 0 BULAN
18	YOSE ELFASRI, S.H. 1980 0325 2006 04 1004	Penata Muda III/a	01-Apr-19	08 TAHUN 0 BULAN
19	SUNARTO 1965 1011 1986 03 1006	Penata Tk.I III/d	01-Sep-19	28 TAHUN 0 BULAN
20	ADDYATAMA PRATAMA 1981 0528 2003 12 1001	Penata Tk.I III/d	1 Desember 2019	14 TAHUN 0 BULAN
21	SENO AJIARIFIANTO 1977 1101 2003 121002	Penata Tk.I III/d	1 Desember 2019	16 TAHUN 0 BULAN
22	CAESAR ARYO BOEDIONO RAHARJO, S.T. 1984 0622 2009 12 1002	Penata Muda Tk.I III/b	1 Desember 2019	08 TAHUN 0 BULAN

Jumlah Dokumen Keuangan UPT

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Keuangan UPT	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pagu anggaran pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebesar Rp. 14.501.677.000,- kemudian berkurang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pagu minus UPT lain sehingga pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menjadi sebesar Rp. 14.301.677.000,-.

Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta secara rutin menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara, Laporan Konfirmasi Afirmasi Pajak, dan Rekonsiliasi SAIBA ke KPPN Jakarta I sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

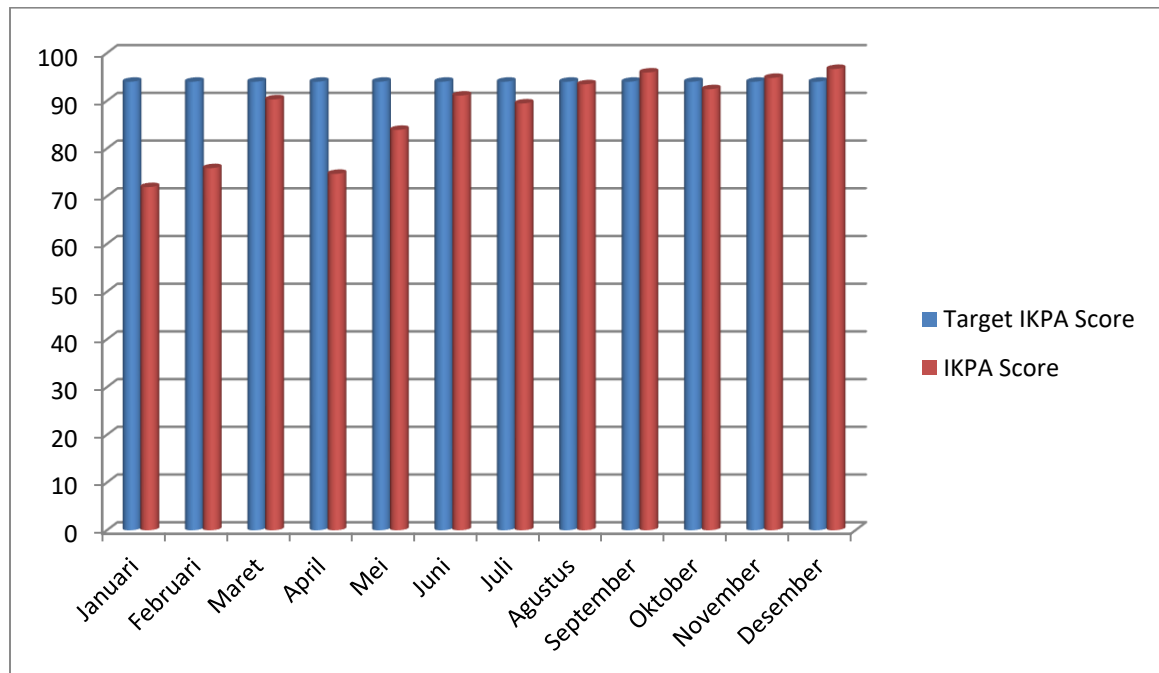
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score	94% (dari skala 100)	96,68%	102.85%

Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mencapai nilai IKPA akhir sebesar 96,68% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta telah melaksanakan pengelolaan anggaran pada tahun 2019 dengan cukup baik, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut perbandingan capaian IKPA Score yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta selama tahun anggaran 2019 dengan target nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI:



Anggaran (IKPA Score) selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	-	-	94% (dari skala 100)	96,68%

Indikator capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) baru diterapkan pada tahun 2019 dengan target capaian sebesar 94% (dari skala 100). Penilaian IKPA Score ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kualitas laporan keuangan.

B. Kinerja Lainnya

Pada tahun 2019 Seksi Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pelaksanaan Perizinan Maritime On The Spot oleh UPT Jakarta (pilot project).
Kegiatan ini sebagai pilot project dari Direktorat Operasi Sumber Daya yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) UPT. Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Perizinan Maritime On The Spot adalah Edukasi kepada nelayan pentingnya penggunaan perangkat radio maritim (Gerakan Nelayan Sadar Frekuensi), mengurangi gangguan frekuensi radio dinas penerbangan oleh dinas maritim (nelayan), meningkatkan pengetahuan tata cara komunikasi marabahaya bagi Nelayan. Pelaksanaan kegiatan ini selama 4 bulan dari bulan September s.d Desember. Pelaksanaan kegiatan MOTS di Balmon Jakarta bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara. Pagu anggaran kegiatan MOTS Rp. 21.760.000,-.. Hasil dari kegiatan perizinan ISR MOTS adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil dari Kegiatan Perizinan ISR MOTS

No		JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENGUNJUNG		
	a. ISR (IJIN STASIUN RADIO)	85	
	b. SOR (SERTIFIKAT OPERATOR RADIO)	288	
2.	PERMOHONAN YANG SEDANG DI PROSES		
	a. ISR (IJIN STASIUN RADIO)	0	
	b. SOR (SERTIFIKAT OPERATOR RADIO)	0	
	c. IKRAP (IJIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK)	0	
3.	PERMOHONAN YANG SUDAH SELESAI DI PROSES/ KELUAR ISR ATAU SERTIFIKAT		
	a. ISR (IJIN STASIUN RADIO) BELUM EFEKTIF	9	
	b. ISR (IJIN STASIUN RADIO) SUDAH EFEKTIF	12	
	c. SOR (SERTIFIKAT OPERATOR RADIO)	288	
	d. IKRAP (IJIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK)	0	

Foto Kegiatan Perizinan ISR Maritime On The Spot





2. Asistensi dan Pendampingan Pembuatan Akun Spectra Webb

Pada tahun 2019 Seksi Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan Asistensi dan Pendampingan Pembuatan Akun Spectraweb yang dilaksanakan di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2019. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Asistensi dan pendampingan pembuatan Akun Spectra adalah untuk mempermudah para Wajib Bayar (WABA) yang telah mempunyai ISR untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran dan lainnya. Hasil dari kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pembuatan Akun Spectraweb adalah sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pembuatan Akun Spectra

No.	BULAN	PESERTA		STATUS		ANGGARAN
		HADIR	TIDAK HADIR	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	
1	2					3
1	Juli	5	5	1	4	
2	Agustus	10	17	9	1	
3	September	6	4	3	2	
4	Oktober	1	9	0	1	

5	November	9	24	2	3	
6	Desember	6	15	1	5	
Jumlah		37	74	16	16	

Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pembuatan Akun Spectraweb



C. Realisasi Anggaran

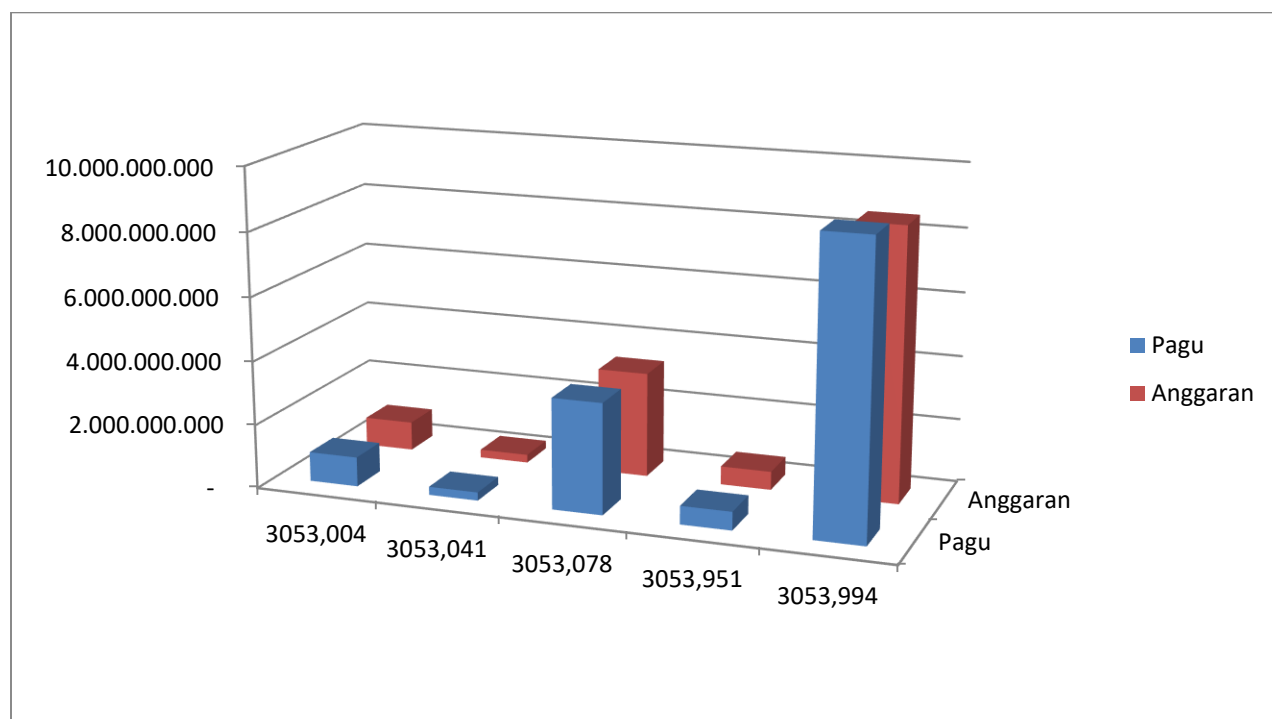
Pagu anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebesar Rp. 14.301.677.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.566.425.078 atau 94,86%.

Tabel Realisasi Berdasarkan jenis output:

No	Kode Ouput	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	3053.004	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan	924.306.000	904.799.300

		Informatika Balmon Kelas I Jakarta		
2.	3053.041	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta	256.580.000	252.129.000
3.	3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio UPT Ditjen SDPPI	3.460.897.000	3.290.662.615
4.	3053.951	Layanan Internal (Overhead)	581.980.000	575.437.500
5.	3053.994	Layanan Perkantoran	9.077.914.000	8.543.396.663
TOTAL			14.301.677.000	13.566.425.078

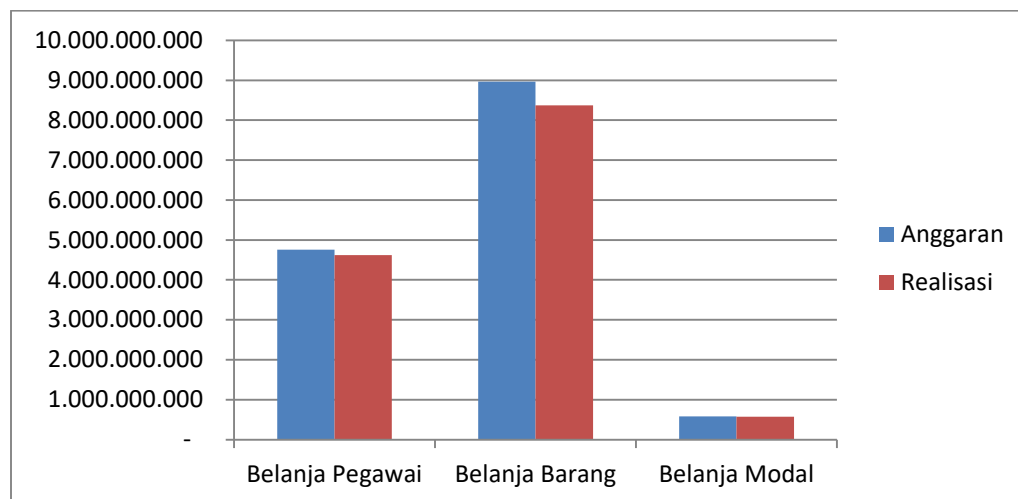
Komparasi Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis *Output* Tahun Anggaran 2019



Realisasi Anggaran per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan jenis belanja:

Uraian	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	4.756.502.000	4.623.731.301	97,20%
Belanja Barang	8.963.195.000	8.367.256.277	93,35%
Belanja Modal	581.980.000	575.437.500	98,87%
Total	14.301.677.000	13.566.425.078	94,86%

Komparasi anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja:



Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan 2018:

Uraian	2015	%	2016	%
	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	3,816,874,615	98.27%	3,932,549,591	94.82%
Belanja Barang	5,796,471,265	57.72%	5,674,412,154	86.65%
Belanja Modal	4,450,684,850	98.60%	-	-
Total	14,064,030,730	76.27%	9,606,961,745	89.82%

Uraian	2017	%	2018	%
	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	5,336,387,022	99.21%	4,731,700,375	90.88%
Belanja Barang	8,396,086,077	97.24%	9,508,070,710	96.06%
Belanja Modal	2,494,300,000	99.29%	994,365,400	97.04%
Total	16,199,773,099	98.20%	15,234,136,485	94.45%

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit / satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik Negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Berdasarkan penyerapan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2019 ini telah terealisasi sebesar Rp.13.566.425.078 atau sebesar 94,86%.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2019 ini dibuat sebagai evaluasi kinerja dan juga sebagai indikator dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi di tahun yang akan datang.



SERTIFIKASI MUTU INDONESIA



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikat Sistem Manajemen Mutu
LSSM-047-IDN

ISO 9001 : 2015



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

JL. PKP Raya No. 30 Kelapa Dua Wetan
Ciracas - Jakarta Timur 13730

● (021) 2938 4551 (hunting)

☎ (021) 2938 4559

● upt_jakarta@postel.go.id